

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian pengaruh Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018 dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderasi dengan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018.
2. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018.
3. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mampu memoderasi Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018
4. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memoderasi Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018.

B. Implikasi

Adapun implikasi teoritis maupun praktis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri karena pemerintah pusat telah memberikan hak dan wewenang untuk pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri serta memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat yang rendah sehingga Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat . Pendapatan asli daerah memiliki peran untuk membiayai kebutuhan daerah, apabila Pendapatan Asli Daerah tinggi maka semakin meningkat kinerja keuangan daerahnya dan akan berimbas kepada menurunnya kebutuhan akan Dana Perimbangan, karena tujuan adanya Dana Perimbangan tersebut untuk menutupi kebutuhan dari pembiayaan daerah jika Pendapatan Asli Daerah yang diterima tinggi maka kebutuhan akan Dana Perimbangan menurun sehingga Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.

Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 Aset milik daerah adalah aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah, salah satunya lewat Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan tersebut dialokasikan untuk belanja daerah salah satunya untuk menambah nilai aset, Ukuran Pemerintah Daerah pada penelitian ini diprosikan dengan nilai aset. Jika nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah besar maka secara teoritis akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lewat nilai aset yang telah dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan apabila pemerintah mampu mengelola asetnya dengan baik maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lalu kebutuhan akan Dana Perimbangan semakin rendah karena tujuan dari Dana Perimbangan untuk pembiayaan daerah maka Pendapatan Asli Daerah akan menutupi kebutuhan pembiayaan daerah tersebut sehingga nantinya akan berimplikasi kepada meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Praktis

Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Provinsi Banten diharapkan akan dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya, dikarenakan dari hasil penelitian yang didapatkan rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dihitung dengan rasio ketergantungan sebesar 0.6257 lebih besar dari 0.50 yang mengartikan bahwa pemerintah Provinsi Banten 2012-

2018 masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya hasil penelitian Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018 yang mengartikan bahwa kebutuhan akan dana tersebut masih tinggi di Provinsi Banten sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya pemerintah Provinsi Banten dapat mengurangi kebutuhan akan dana tersebut dikarenakan semakin besar kebutuhan akan dana tersebut akan berimplikasi terhadap menurunnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan cara mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya salah satunya lewat pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Lalu Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan nilai aset yang dimiliki oleh Provinsi Banten berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018, salah satu faktornya adalah pemerintah Provinsi Banten belum dapat memanfaatkan nilai aset yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, seharusnya pemerintah Provinsi Banten dapat memanfaatkan nilai aset yang dimiliki untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan yang dimiliki serta dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. Dari hasil pengamatan

Pendapatan Asli Daerah mampu mempengaruhi secara positif Dana Perimbangan atau dengan kata lain mampu memoderasi Dana Perimbangan di Provinsi Banten. Apabila kebutuhan pembiayaan daerahnya telah tercukupi oleh Pendapatan Asli Daerahnya maka kebutuhan akan Dana Perimbangan melemah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin menurun dan berimplikasi kepada meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Namun pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memoderasi Ukuran Pemerintah Daerah yang diukur oleh nilai aset yang dimiliki, dikarenakan besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Banten 2012-2018 salah satu faktor yang membuat hasil tersebut tidak berpengaruh dikarenakan besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Provinsi Banten 2012-2018 belum mampu untuk mempengaruhi hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Seharusnya pemerintah Provinsi Banten mampu untuk mengelola besarnya aset yang dimiliki sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi lewat Pendapatan Asli Daerah, apabila nilai Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki besar maka akan mempengaruhi hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah., sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak memoderasi hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2018.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah sampel, dikarenakan hanya ada 8 kota maupun kabupaten di Provinsi Banten maka peneliti harus menambah jumlah sampel lewat tahun sehingga penelitian ini mengambil tahun anggaran dari 2012 sampai 2018.
2. Keterbatasan Variabel, variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah serta Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 52.20%, sisanya sebesar 47,80% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan pemilihan populasi serta jumlah sampel, sehingga nantinya tahun yang akan dijadikan penelitian memiliki rentang tahun yang kecil agar tidak sulit untuk mendapatkan data. Contohnya populasi yang lebih luas seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur bahkan negara Indonesia sekalipun bisa untuk dijadikan penelitian.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain diluar dari variabel yang digunakan pada penelitian ini agar lebih mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah contohnya seperti variabel Belanja Modal, SILPA, dan lain lain variabel yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah